



IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DI LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II.A PEKANBARU

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

ARIANDO FERNANDES HUSEINI

NIM. 11375102211

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an menyebutkan sumber:
ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

: ARIANDO FERNANDES HUSEINI

: 11375102211

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: ADMINISTRASI NEGARA

: IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-
19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DI LEMBAGA
PEMASYARAKAT KELAS II.A PEKANBARU

: JUMAT / 9 JULI 2021

Disetujui oleh;

Pembimbing

Dr. Jhon Afrizal, MA
NIP. 197909112011011003

Mengetahui;

Dekan

Ketua Jurusan



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

: ARIANDO FERNANDES HUSEINI

: 11375102211

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: ADMINISTRASI NEGARA

: IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-
19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DI LEMBAGA
PEMASYARAKAT KELAS II.A PEKANBARU

: JUMAT / 9 JULI 2021

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui;

Penguji I

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIK. 130 712 074

Penguji II

Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020
DI LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II.A PEKANBARU**

ABTRAK

Oleh:

ARIANDO FERNANDES HUSEINI
NIM. 11375102211

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut; Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Edwar C. III, yakni mengacu kepada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kendala-kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, berdasarkan observasi peneliti lapangan ditemukan beberapa kendala yakni Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum tersedia tenaga medis yang memahami Covid-19, Keterbatasan Anggaran yang bukan menjadi kendala utama, Keterbatasan Fasilitas dalam rangka pencegahan Covid-19 belum lengkap, Koordinasi dengan Instansi Lainnya yang membutuhkan waktu seperti koordinasi dengan tim medis pemerintah daerah dan instansi lainnya yang terkait.

Kata Kunci : *Implementasi Keputusan Menteri, Lembaga Pemasyarakatan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

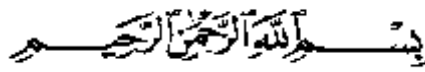
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah datang dengan Islam dan Al-Qur'an sebagai pedoman setiap insan yang senantiasa teguh dengan pendiriannya dalam melaksanakan ajarannya serta serta membimbing umat manusia menuju ilmu pengetahuan dan keimanan.

skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul: **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBABSAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru)”**.

Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung peneliti baik dengan bantuan moral ataupun material selama berlangsungnya peneliti tujukan Kepada:

1. Ayahanda tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, Semangat dan untaian doa yang terus mengalir kepada saya sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan penuh baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan, serta kelarga besarku
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. Muhammad Said, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, MH selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/ Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan arahan, semangat dan senantiasa memotivasi penulis.
7. Bapak/Ibu pegawai akademik yang selalu memberikan pelayanan dan arahan dalam pengurusan penyusunan skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Administarasi Negara angkatan 2013 yang selalu mewarnai hari-hari di kampus yang selalu memberi dukungan dan doa serta sahabat lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Kepada mereka saya hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga perbuatan baik mereka menjadi amal shaleh dan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Amin.

Saya menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan. Untuk itu saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan konstruktif lainnya guna memperbaiki kualitas skripsi ini untuk masa yang akan datang dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, April 2020

ARIANDO FERNANDES HUSEINI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Kebijakan dan Impelemntasi Kebijakan.....	11
2.2. Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan.....	16
2.3. Kajian tentang Lembaga Kemasyarakatan	20
2.4. Pandangan Tentang Asimilasi Bagi Narapidana	21
2.5. Penelitian Pendahuluan.....	22
2.6. Tinjauan Hukum Islam tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.7. Indikator Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penilaian.....	27
3.2. Lokasi Penelitian.....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakat Kelas II.A Pekanbaru	31
4.2 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru	32
4.3 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.....	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru	38
5.2. Kendala - kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru	67
--	----

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

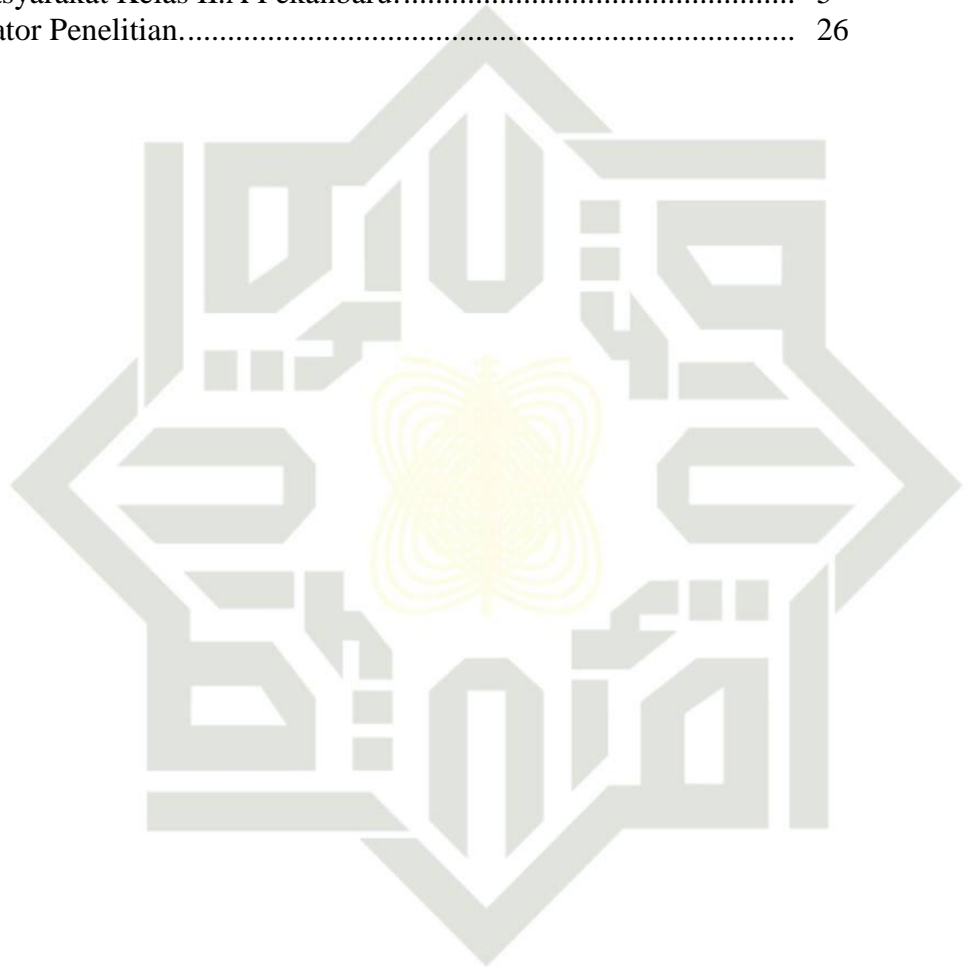
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tab 1.1	Perkembangan Jumlah Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019.....	3
Tab 1.2	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.....	5
Tab 2.1	Indikator Penelitian.....	26



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah, bagian terintegrasi dari jajaran Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Selain dari pada itu Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai Unit Pelaksana Teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indoensia, baik ditingkat Provinsi Maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Lembaga Pemasyarakatan yang juga merupakan salah satu pusat pembinaan para narapidana yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal sebagai nama penjara juga, merupakan satu proses pembinaan narapidana yag memamndang narapidana sebagai ; mahluk tuhan, individu dan anggota masyarakat. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, lembaga pemasyarakatan menjadi bagian integrasi sistem hukum di Indonesia.

Selain peranannya sebagai penegak hukum, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas, berahklak, dan bermartabat. Sejalan dengan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada, kemudian ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Narapidana yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan, akan memperoleh pembinaan selama masa tahanan yang mereka lalui. Selain pembinaan narapidana juga mendapat pengurangan masa tahanan baik melalui proses remisi maupun melalui proses asimilasi. Remisi biasanya diberikan kepada narapidana berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, remisi hari raya dan remisi karena jasa narapidana yang dilaksanakan selama pembinaan. Pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Selain remisi di atas, narapidana juga menerima pengurangan masa tahanan melalui kebijakan asimilasi. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan mambaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Adapun dasar hukum pemberian asimilasi adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dari Permenkumham tersebut dijelaskan syarat narapidana yang mendapatkan asimilasi di haruskan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- Dan telah menjalani $1/2$ (satu per dua) masa pidana.

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Pekanbaru dibawah wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Sebagai lembaga vertikal dari pemerintah pusat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru selalui mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan bagi narapidana tersebut. adapun perkembangan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru sejak lima tahun terakhir dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini;

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	1.547
2.	2016	1.413
3.	2017	1.511
4.	2018	1.602
5.	2019	1.717

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dikatakan bahwa jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.a Kota Pekanbaru, mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2019, dengan penambahan rata-rata 100 orang narapidana setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran hukum di wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru dalam beberapa tahun terakhir ini. Munculnya kasus *Corona Virus Deases* (Covid) 19, mengharuskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru untuk melakukan *Social Distancing* dan juga *Physical Distancing* untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut bagi narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru. hal inilah yang menjadi rujukan untuk membebaskan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru melalui asimilasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana juga dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Untuk mengetahui jumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dan integrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, dapat dilihat dari gambaran tabel berikut ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2.

**Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :
M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru**

No.	Jenis Pembebasan	Jumlah
1.	Asimilasi	54
2.	Integrasi	63
3.	Integrasi Bersyarat	1
Total		118

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, 2020

Berdasarkan tabel 1,2 di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, telah melakukan asimilasi terhadap narapidana sebanyak 54 orang dan pemberian kebebasan integrasi (memenuhi syarat bebas) sebanyak 63 orang dan integrasi bebas bersyarat sebanyak 1 orang, sehingga jumlah yang dibebaskan selama musim pandemi Covid-19 berjumlah 118 orang narapidanan. Jika dilihat dari data tersebut, pemberian asimilasi belum banyak bila dibandingkan dengan pembebasan integrasi, hal ini ber arti masih ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asimilasi tidak bisa diberikan kepada, Narapidana yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan Pmasyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, adanya pembatasan pemberian remisi dan pemotongan masa hukuman terhadap narapinada; tipikor, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM Berat, kejahatan transnasional terorganisasi.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, terdapat beberapa gejala yang menunjukkan bahwa implementasi keputusan tersebut belum berjalan secara maksimal, diantaranya asimilasi seharusnya juga diberikan keada semua Narapidana, karena virus Covid 19 tidak melihat jenis Narapidana yang menjalani hukuman, akan tetapi penularannya kepada manusia. Untuk itu perlu melihat secara mendalam pelaksanaan keputusan menteri tersebut, sehingga peneliti ingin memfokuskan kajian penelitian ini dengan judul **“Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakat Kelas II.A Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid_19 memberikan dampak terhadap pembebasan narapidana untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut kepada para narapidana yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru. pemberian asimilasi tersebut di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru?
2. Kendala-kendala apasajakah yang ditemukan dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.

2. Menjelaskan Kendala-kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, khususnya bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.
2. Sebagai sumbangan informasi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan dapat berguna bagi para teoritis, praktisi penelitian dalam bidang hukum, juga dapat menjadi bahan bahasan lebih lanjut utamanya masyarakat peneliti atau peneliti selanjutnya.

1.1. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan penggunaan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BabII :Kajian pustaka yang membahas tentang Tinjauan Hukum, Konsep Narapidana, Konsep Remisi, Kajian tentang Asimilasi dan Pandangan Hukum Islam terhadap Narapidana.

BabIII : Metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Gambaran Umum Daerah Penelitian yang meliputi kondisi geografis Kota Pekanbaru, kondisi keagamaan masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat Pekanbaru, Gambaran Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menyangkut; Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, dan Kendala – Kendala dalam Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru

Bab VI : Merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan dan Impelemntasi Kebijakan

Pengambilan kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (1988:14) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku yang dipilih mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang. Menurut Wibawa, dkk (1994:4) menjelaskan bahwa, guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Lebih lanjut Topatimasang (2000:41) menjelaskan bahwa upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Menurut Dunn (2003:68) masalah kebijaksanaan adalah nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Informasi mengenai masalah dan potensi pemecahannya, dihasilkan melalui penerpan prosedur analisis kebijaksanaan perumusan masalah. Proses perumusan masalah kebijaksanaan tidak mengikuti aturan-aturan defenitif, karena masalah kebijaksanaan itu sendiri sedemikian kompleks.

Pandangan diatas dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan merupakan suatu serangkaian keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan menetapkan secara formal apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh suatu lembaga. Kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya adalah untuk mempermudah dan memperlancar kinerja dari suatu lembaga.

Proses lahirnya sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga, tidak akan terlepas dari formulasi kebijakan yang merupakan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan tersebut, dan evaluasi kebijakan yang merupakan tindakan korektif terhadap hasil kebijakan yang telah dilaksanakan. Perumusan kebijakan yang baik dan terencana secara matang akan melahirkan implementasi kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan menurut William dan Elmore dalam Sunggono (2004:139) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Wibawa, dkk (2001:15) mengatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara mencapai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Didalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas dan kemudian diinterpretasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Meter dan Horn (1975:6) yang mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan publik maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransmisikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan dalam pembangunan Negara perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang melahirkan konsep pembangunan dalam suatu Negara.

Mazmanian dan Sabetier dalam Wahab (2001:71) mengungkapkan bahwa, peran penting dari analisis implementasi kebijakan Negara ialah mendefinisikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu : (1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan; (2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi; dan (3) pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Grindle dalam Santoso (2000:13) mengungkapkan bahwa, keseluruhan proses kebijakan baru bisa dimulai bila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, serta dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya menurut Grindle (1980:12) mengatakan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekedar terkait dengan bagaimana mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik ke dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur rutin melewati saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Edwar III dalam Indiahono (2009:31) mengatakan bahwa model implementasi kebijakan publik, menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
 - b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah, kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan/program.

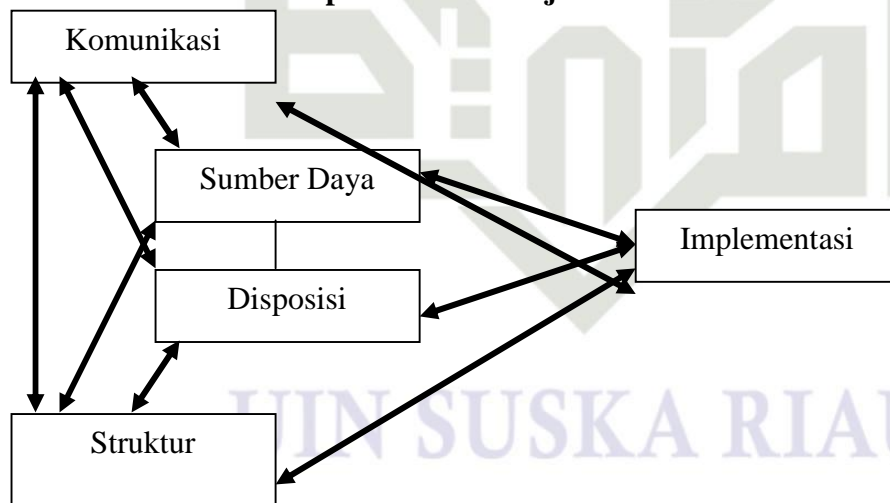
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating prosedur* (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun dan disusun oleh Edwar memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Model dari Edwar III ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar. 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edwar III



Sumber : Edwar III 1980:48 dalam Indiahono 2009:33

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan dalam pembangunan, perlu adanya formulasi kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan dapat mencapai sasaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharapkan. Selain dari pada itu implementasi kebijakan juga perlu adanya evaluasi kebijakan untuk memperbaiki kelemahan yang dihadapi serta sebagai bahan masukan atau *feed back* dalam membuat atau merumuskan kebijakan yang baru.

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa, kebijakan yang dibuat dalam memenuhi kebutuhan publik, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga dampak dari kebijakan tersebut lebih banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan juga merupakan unsur terpenting dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang melahirkan kebijakan publik dan perlu adanya evaluasi dari setiap kebijakan yang dibuat, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

2.2. Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan

Pelayanan publik secara sederhana dapat dikatakan sebagai pemberian jasa yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan tersebut memiliki berbagai kriteria. Adapun kriteria pelayanan yang baik menurut Vincent Garperz (2004:90) adalah terdiri dari atribut pelayanan sebagai berikut :

- Ketepatan waktu
- Akurasi pelayanan
- Kesopanan dan keramah- tamahan dalam memberikan pelayanan
- Tanggung jawab
- Kemudahan mendapatkan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
- Atribut pendukung pelayanan lainnya.

Pada dasarnya unsur- unsur pokok dari pelayanan tersebut menurut F. T. L. Simons dalam Kencana Syafie, (1999 : 100) terdiri dari :

1. Biayanya relatif harus lebih rendah
2. Waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat
3. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

Menurut Alwis (2002;36) pelayanan prima adalah komitmen organisasional birokrasi pemerintahan. Komitmen organisasional bermakna keberpihakan Birokrasi pemerintahan yang harus berada dipihak masyarakat. Melayani berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan /sesorang masyarakat. Dikaitkan dengan pelayanan prima, maka bantuan dalam menyiapkan dan kepengurusannya harus sebaik mungkin. Hal ini berarti pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki kualitas unggul. Ukuran kualitas pelayanan prima dapat dilihat dari :

1. Penggunaan Waktu atau ketepatan
2. Kecepatan atau prosedur yang tidak bertele- tele, serta tidak adanya kesalahan,
3. Penggunaan biaya administrasi yang terjangkau (murah)

Pelayanan menurut Suparlan (1994:16) adalah unsur memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik materil maupun non materil agar orang lain itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Selanjutnya menurut Zuhelmi (1991:41) mengatakan bahwa pelayanan merupakan pengabdian serta pelayanan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta manajemen yang baik dan memuaskan.

Menurut Moenir (1992:17) pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sedangkan menurut Stanipar (1995:5) pelayanan merupakan suatu cara atau teknik dalam memenuhi, menanggapi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang lain.

Lebih lanjut Menurut Thoha (1991:43) pelayanan yang memuaskan mengandung lima unsur yaitu :

1. Pelayanan merata dan sama
2. Pelayanan yang diberikan tepat waktunya
3. Pelayanan yang diberikan memenuhi jumlah barang dan jasa.
4. Pelayanan harus merupakan pelayanan yang berkesinambungan.
5. Pelayanan merupakan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan.

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan nilai tambah yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Menurut Sardarmayanti (2003:2) *good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

and service disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan dalam praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peranan dinas daerah sebagai unsur lini dan berhadapan langsung dengan masyarakat semakin diperkuat. Fasilitas dan wibawa kedinasan untuk dinas daerah perlu ditingkatkan agar penyelenggara pemerintahan daerah sebagai pelayanan public menjadi pelayanan yang berkualitas. Menurut Wasistiono (2003:27) menjelaskan bahwa kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelayanan disebabkan oleh banyak hal, antara lain ;

- a. Kurang tepatnya persepsi mengenai pembagian tugas antara unsur staf dan unsur lini.
- b. Kurang dekatnya akses hubungan antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah, karena faktor pimpinannya ataupun karena letak kantornya yang berjauhan.
- c. Belum tingginya tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga peranan unsur lini sebagai garis depan (*fontline*), kurang memperoleh perhatian.

Perwujudan pemerintahan yang baik perlu melibatkan seluruh elemen pemerintahan yang dimulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi, Pemerintahan Kabupaten atau Kota, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. Jika kesemua elemen ini terlaksana dengan baik dan saling mendukung maka penyelenggaraan pemerintah sebagai pelayanan publik akan

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan keinginan masyarakat.

2.3. Kajian tentang Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga masyarakat sebagai suatu tempat pembinaan masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tindakan pidana. Menurut Sholehuddin (2003:114) yang menyatakan bahwa, bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi keberadaanya yang akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Menurut Harsono (1995:5) lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.

Sedangkan menurut David (2008:1) yang mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (disingkat menjadi Lapas) secara ideal mengandung makna berperan memasyarakat kembali para warga binaan yang melanggar hukum dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berpikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh kesadaran dari pada warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa lembaga permasyarakatan merupakan wadah untuk melakukan pembinaan dan perbaikan sikap, mendat dan pola pikir orang-orang yang telah melakukan pelanggaran hukum dan aturan yang berlaku. Sesuai dengan namanya lembaga pemasyarakatan berarti menjadikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sehingga mereka bisa kembali hidup ditengah-tengah masyarakat.

2.4. Pandangan Tentang Asimilasi Bagi Narapidana

Asimilasi secara sederhana dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Soekanto (1990:83) asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa asimilasi merupakan proses peleburan atau penyatuan terhadap perbedaan. Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dengan demikian asimilasi juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan proses, hal ini dikatakan Koentjaraningrat (1990:209) yang mengatakan bahwa proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan timbulnya asimilasi yaitu, apabila;

Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan-lingkungan kebudayaan berbeda.

Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga,

Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.

Sementara asimilasi dalam pandangan hukum menurut Jufri, dkk adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa asimilasi dalam kajian hukum memiliki makna yang hampir sama dengan pandangan sosiolog yang intinya terjadinya pembauran ditengah masyarakat terhadap individu-individu atau kelompok yang terpisah dan berbeda berdasarkan status sosial maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

2.5. Penelitian Pendahuluan

Sebagai bahan perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang lain, dapat kita lihat dari beberapa penelitian pendahuluan. Adapun penelitian pendahuluan yang peneliti temukan adalah sebagai berikut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Indra Hariyanto. 2015. Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah asimilasi narapidana di Lapas Klas IIA Yogyakarta hanya asimilasi di dalam Lapas, sedangkan asimilasi di luar Lapas atau dengan pihak ketiga lembaga belum mengadakannya namun sedang dalam proses pengadaan. Asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan cara bekerja di lingkungan Lapas. Terdapat tiga narapidana yang sedang melakukan asimilasi, mereka bertiga diberi tanggung-jawab menjaga parkir dan menjaga kebersihan lingkungan parkir. Dalam melakukan asimilasi narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi sosial dengan pengunjung dan masyarakat sekitar Lapas.
- b. Waraney C.V.Panungkelan. Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016. Penerapan Asimilasi Di Rutan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi, yaitu kelebihan daya tampung (overcapacity) yang merupakan masalah klasik dalam lembaga pemidanaan di Indonesia, masalah kelebihan daya tampung ini akibat tingginya angka kriminalitas sehingga LAPAS dan RUTAN tidak mampu lagi menampung narapidana, faktor ini berpengaruh pada tidak optimalnya penerapan 1 Artikel Skripsi.
- c. AYU OCTIS PRATIWI. 2016. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Pembinaan Narapidana Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Metro).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan untuk narapidana remaja berjalan dengan baik dan efektif di Lembaga Pemasyarakatan Metro, namun perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas terhadap petugas LAPAS agar dapat melakukan tugasnya melakukan pembinaan dengan maksimal.

- d. Hevi Selvina 2017. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Peran lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Kotaagung). hasil dari penelitian bahwa : peran Lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana adalah kenyataannya bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut terkendala oleh beberapa hal seperti, pasilitas lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai jumlah pegawai/penjaga yang tidak sesuai dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang di jaga di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

2.6. Tinjauan Hukum Islam tentang Lembaga Pemasyarakatan

Penegakkkan hukum bai narapidana haruslah berasaskan pada prinsip keadilan. Seruan berlaku adil dalam Al Quran sangatlah banyak, hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur"an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan, dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah,karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Selanjutnya kajian remisi atau pengampunan menurut Abdul azis. Dkk (2001) yang mengatakan bahwa Adapun ukuran untuk menentukan pelaku pidana tersebut telah bertaubat belum disebutkan secara jelas dalam hukum pidana Islam, yang dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Namun menurut Imam al-Qusyairi (seorang sufi zaman klasik dari Persia), menerangkan bahwa syarat taubat yang sah itu ada tiga: 1) Menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan 2) Meninggalkan perbuatan maksiat itu 3) Azam (bercita-cita) tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

2. Indikator Penelitian

Adapun indikator dari peelitian tentang Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakat Kelas II.A Pekanbaru, adalah sebagai berikut,

Tabel 2.1 : Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-9.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakat Kelas II.A Pekanbaru	1. Komunikasi	a. Saluran b. Sosialisasi c. Tujuan dan Sasaran
	2. Sumber Daya	a. Sumberdaya Manusia b. Sumber Daya Financial
	3. Disposisi	a. Kejujuran b. Komitmen c. Demokratis
	4. Struktur Birokrasi	a. Mekanisme b. Struktur organisasi

Sumber : Teori Edwar C III dalam Indiahono (2009)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variable satu dengan yang lain. (Sugiono:2010:11), yang menjelaskan tentang Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru dan kendala dalam Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru. dipilihnya lokasi ini dikarenakan Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru, juga melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang diberikan kepada narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni, Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru dan kendala dalam Implementasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru.

3.3.2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang meliputi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, Struktur Organisasi dan data lainnya yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu membuat panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan penelitian kepada responden penelitian

3.4.2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2010:31)

3.5. Informan Penelitian

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menetapkan target responden atau informan penelitian yakni, Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru, Kepala KPLP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Seksi Binadik,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Keamanan, Kepala Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib, Kepala Sub Seksi Bimker dan Pengolahan Hasil Kerja, Kepala Sub Seksi Sarana Kerja, Kepala Sub Seksi Bamkemaswat, dan Kepala Sub Seksi Registrasi.

3.6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu metode yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2012:15). Selanjutnya, data yang terkumpul diberi penjelasan secara deskripsi dengan mengumpulkan hasil wawancara dengan target responden penelitian, observasi dan pengumpulan dokumentasi untuk menemukan masalah penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru

Lapas Kelas IIA Pekanbaru beralamat di Jalan Pemasyarakatan No 19 RT 004 RW 008 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru. Telp./fax 0761-22262. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status **“Penjara”**, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya.

Kondisi bangunan yang ada sejak dibangun dari tahun 1977 sampai dengan saat ini telah dilakukan pengembangan dan perluasan bangunan. Dari bangunan yang semula terdiri dari 1 (satu) unit bangunan gedung kantor, dan tiga blok hunian saat ini bertambah menjadi 8 (delapan) blok hunian. berikut dengan aula, masjid, gereja, dapur dan workshop (bingker). Tahun 2007 mendapat bantuan pembangunan gereja, tahun 2009 mendapat bantuan pembangunan blok hunian dua lantai dan tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuh hibah. Namun pada gedung kantor utama dan beberapa blok hunian serta pagar keliling telah terlihat tua namun upaya setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung.

Lapas Kelas IIA Pekanbaru beralamat di Jalan Pemasyarakatan No 19 RT 004 RW 008 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kodya Pekanbaru. Telp./fax 0761-22262. Jarak dengan instansi terkait yakni; Jarak dengan Mapolda Riau, SPN Pekanbaru, Kantor Gubernur, Kantor Walikota, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi \pm 4 Km; Jarak dengan Pengadilan Negeri, Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, RSUD Arifin Ahmad, Polsek Bukit Raya \pm 5 Km; Jarak dengan Mapolresta Pekanbaru, Rutan Pekanbaru, Rupbasan Pekanbaru \pm 6 Km dan ; Jarak dengan Bapas Pekanbaru \pm 9 Km.

4.2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru

Total pegawai berjumlah 109 orang / pejabat struktural 14 orang / pegawai staf kantor 45 orang / petugas pengamanan 64 orang. Kapasitas isi penghuni 771 orang WBP. Sedangkan Kegiatan Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian meliputi;

- Kegiatan Produksi Sandal Hotel
- Kegiatan Pembuatan Tenun Songket
- Kegiatan Las Listrik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Pertukangan Kayu

Kegiatan Menjahit

Peternakan Bebek petelur dan pedaging

Peternakan Ayam Kampung

Perikanan

Pertanian terong dan kangkung, cabe dll

10. Kegiatan Pramuka dengan SK Gudep nomor 110 tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 dengan nama Gudep 07-075 Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

11. Kegiatan Pendidikan Paket A,B,C

12. Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Pemasarakatan) nomor usulan 03/PKBM.PAS/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

13. Kegiatan Pembinaan agama islam berupa pesantren kilat, ceramah agama rutin dll

14. Kegiatan agama Kristen, agama budha dll

15. Kegiatan olahraga Volly ball, Tenis Meja, Tenis lapangan, takraw, badminton, senam dll.

16. Kegiatan Perkuliahan pegawai jajaran Kemenkumham Riau

17. Kegiatan kesenian Kompang

Sedangkan Kerjasama dengan instansi terkait adalah;

MoU perkuliahan pegawai dengan Jurusan Kriminologi Universitas Islam Riau tentang Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Nomor : W4.HM.03.04-2589/ 5582/A-UIR/1-2016 tanggal 01 Agustus 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MoU dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan nomor: W4.PAS.1.HM.05.02-308 tanggal 17 Maret 2015 tentang pelaksanaan program kegiatan pembelajaran kesetaraan paket A/B/C dan Life Skill di lingkungan Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

MoU dengan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam kegiatan program pengembangan Pendidikan Ilmu Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru tanggal 02 Februari 2016.

4. MoU dengan Penyedia Tenun Songket, CV Winda Solution tentang Pelatihan Tenun Songket dan Pemasaran serta Pembagian Hasil Tenun Songket tanggal 24 September 2014

5. MoU dengan Penyedia Sandal Hotel Yayasan Ar-Rahma tentang Kerjasama Pelatihan Keterampilan Produksi Sandal Hotel Bagi WBP Lapas Kelas IIA Pekanbaru Nomor: W4.PAS1.PK.08.03-189 tanggal 16 Februari 2015.

MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum Asep Ruhayat & Patners tentang Pendampingan dan sebagai kuasa hokum bagi Pegawai Lapas Kelas IIA Pekanbaru serta Pendampingan dan kuasa hokum bagi seluruh tahanan/Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Selain itu Lapas Pekanbaru menjalin kerjasama yang baik dengan segenap instansi antara lain : Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi Riau, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Pelalawan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepolisian Daerah Riau, Kepolisian Resort Kota Besar Pekanbaru, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Kepolisian Sektor Bukit Raya, Korem 031 Wirabima Pekanbaru, Kementerian Agama Kanwil Riau, Majelis Dakwah Islam Kota Pekanbaru, ICMI Riau, disamping itu dengan instansi diwilayah jajaran Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Riau

Lapas Pekanbaru yang terletak di Kota Pekanbaru sebagai kota yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa pendatang yang heterogen antara lain suku Minang, Melayu, Jawa, Batak, China, Aceh Sunda dan lain-lain, sehingga perpaduan suku budaya dan agama menjadi hal yang wajar. Masing-masing menyadari dengan perbedaan, walaupun secara social budaya masyarakat di dominasi oleh budaya dari Sumatera Barat dan mayoritas beragama Islam namun budaya ini secara signifikan tidak mempengaruhi terhadap proses pembinaan dan pengamanan di Lapas, meskipun secara keamanan dan ketertiban sangat rentan adanya gejolak dan gangguan konflik SARA, namun sampai saat ini kondisi dan keadaan Lapas Pekanbaru secara keseluruhan dapat dikatakan aman dan kondusif.

Kondisi bangunan yang ada sejak dibangun dari tahun 1977 sampai dengan saat ini telah dilakukan pengembangan dan perluasan bangunan. Dari bangunan yang semula terdiri dari 1 (satu) unit bangunan gedung kantor, dan tiga blok hunian saat ini bertambah menjadi 8 (delapan) blok hunian. berikut dengan aula, masjid, gereja, dapur dan workshop (bingker). Tahun 2007 mendapat bantuan pembangunan gereja, tahun 2009 mendapat bantuan pembangunan blok hunian dua lantai dan tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

715 m2, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah. Namun pada gedung kantor utama dan beberapa blok hunian serta pagar keliling telah terlihat tua namun upaya setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan perawatan gedung.

Sistem layanan kunjungan di Lapas Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dengan membuat ruang khusus layanan pendaftaran dan kunjungan. Dengan petugas layanan kunjungan yang terbagi menjadi beberapa regu secara bergantian. Untuk pengunjung yang datang menggunakan nomor antrian dengan tertib. Walau demikian diakui bahwa layanan kunjungan di Lapas Pekanbaru masih menggunakan system manual dikarenakan Unit/Sarana layanan kunjungan berbasis IT belum mampu diterapkan karena peralatan yang telah rusak dan keterbatasan biaya, namun kedepannya Lapas Pekanbaru akan terus memperbaiki dan mengembangkan sehingga system Layanan Kunjungan akan terintegrasi dengan SDP dan secara elektronik akan berbasis IT.

4.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakat Kelas II.A Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori Edwar C. III, yakni mengacu kepada komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
2. Kendala-kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pekanbaru, berdasarkan observasi peneliti lapangan ditemukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

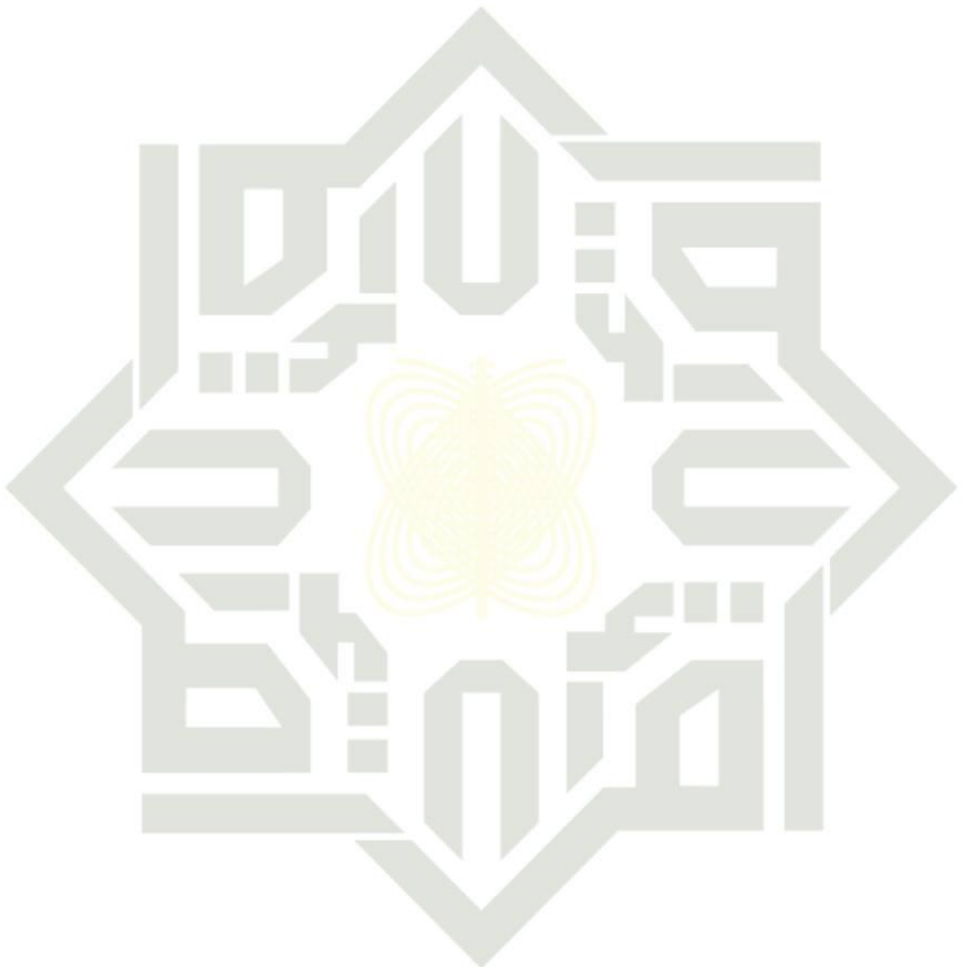
beberapa kendala yakni Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum tersedia tenaga medis yang memahami Covid-19, Keterbatasan Anggaran yang bukan menjadi kendala utama, Keterbatasan Fasilitas dalam rangka pencegahan Covid-19 belum lengkap, Koordinasi dengan Instansi Lainnya yang membutuhkan waktu seperti koordinasi dengan tim medis pemerintah daerah dan instansi lainnya yang terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Implementasi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru, dapat dikemukakan saran sebagai berikut;

1. Bagi pihak Lembaga Masyarakat Kelas II.A Pekanbaru, perlu menyediakan segala perangkat dan instrumen dalam melaksanakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan keputusan menkumham tersebut.

2. Bagi pihak narapidana yang mau dibebaskan, perlu diberikan edukasi tentang Covid-19 oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Pekanbaru untuk mencegah penularan Covid-19 baik bagi keluarga mereka maupun penularan terhadap masyarakat dimana napi tersebut bermukim.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Abdul azis. Dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- David J. Cooke (terjemahan). 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta : Gramedia
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Jufri Ely Alawiyah dan Nelly Ulfah 2017. *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan erbuka Jakarta*. Jakarta : ADIL : Jurnal Hukum.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineke Cipta
- Laswell dan Kaplan. 2001. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moenir. A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta Raja Wali Pers
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*. Banten : Sirao Credentia Center
- Riduwan, DR. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah ; Upaya Membangun Organisasi efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shabarsono AB. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawaliipers
- Smaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Depok : CV. Citra Utama
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sparlan. 2002. *Pelayanan Umum Masyarakat*. Jakarta : Miswaka
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, cetakan ke-20. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19